

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Mamusung et al., 2024) Pajak memegang peran krusial sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara yang mendukung pembangunan nasional dan layanan publik. Penerimaan dari sektor ini secara konsisten ditetapkan sebagai target pertumbuhan tahunan. Guna mengoptimalkan kontribusinya terhadap kas negara, pemerintah telah menggulirkan berbagai inisiatif reformasi perpajakan, mulai dari peningkatan sistem hingga penyempurnaan mekanisme yang ada.

Salah satu transformasi signifikan yang dilakukan adalah pergeseran dari sistem *Official Assessment* ke *Self Assessment*. Perubahan ini tidak dimaksudkan untuk menilai keunggulan salah satu sistem di atas yang lain, melainkan sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal terhadap dinamika ekonomi dan perubahan sosial yang terus berkembang. Peran relawan pajak menjadi sangat krusial di tengah kompleksitas sistem perpajakan. Mereka adalah individu atau kelompok yang secara sukarela membantu masyarakat memahami, mengisi, dan melaporkan SPT Tahunan (PPh) dengan tepat dan benar. Kehadiran mereka menjadi jembatan antara regulasi yang rumit dengan kebutuhan publik akan bimbingan praktis. Meski kewajiban pelaporan SPT menjadi bagian rutin tahunan bagi warga negara, tak sedikit yang menghadapi kesulitan dalam proses pengisiannya. Tantangan ini terutama dirasakan oleh mereka yang kurang memahami ketentuan perpajakan atau memiliki akses terbatas terhadap informasi yang relevan. Oleh karena itu, kontribusi relawan pajak memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara umum (Putri Pratiwi & Diah Widajantie, 2023).

Undang-undang perpajakan yang diterapkan bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan negara, dengan harapan agar pajak sebagai sumber utama pembiayaan dapat memberikan hasil maksimal. Namun demikian, realisasi potensi ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Rendahnya

tingkat pemahaman masyarakat terhadap perpajakan, disertai kondisi ekonomi yang tidak merata serta lemahnya pengawasan dan sanksi hukum yang belum konsisten, menjadi hambatan utama dalam peningkatan kepatuhan. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat edukasi dan penyuluhan perpajakan agar kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, terus meningkat. Sebagai pilar utama dalam kehidupan bernegara, pajak memiliki fungsi vital dalam membiayai pengeluaran negara, khususnya untuk mendukung pembangunan nasional. Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin luas pula ruang fiskal pemerintah untuk melaksanakan inisiatif pembangunan. Sebaliknya, penurunan penerimaan akan berdampak langsung pada terbatasnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri menjadi wujud kontribusi nyata terhadap keberlangsungan roda pembangunan. Pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat setiap tahun. Faktor kunci dalam keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak adalah pemahaman dan disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, memastikan bahwa pendapatan negara tetap berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan atau hambatan ini, pemerintah harus secara efektif menunjukkan bahwa administrasi pajak dapat dilakukan dengan baik dan akurat, sambil juga menegakkan hukum secara konsisten dan tegas (Trawocadji & H.Sitabuana, 2022).

Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan pendanaan yang besar dan terus meningkat seiring perkembangan kebutuhan bangsa. Oleh karena itu, permintaan terhadap dana pembangunan harus disusun secara proporsional dan disesuaikan dengan arah pembangunan yang sedang maupun akan berlangsung. Sumber-sumber pendanaan ini diharapkan mampu memperkuat seluruh sektor keuangan nasional, khususnya sektor perpajakan yang menjadi andalan utama. Dalam kerangka tersebut, strategi fiskal yang berkelanjutan diarahkan untuk

mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan negara, termasuk dari hibah dan pendapatan domestik lainnya. Kebijakan pemerintah dalam hal ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional secara jangka panjang. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang APBN, pendapatan negara terdiri dari tiga elemen utama: pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Ketiga elemen tersebut memiliki peranan strategis sebagai sumber pembiayaan utama bagi berbagai program pembangunan nasional, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hingga infrastruktur. Dalam hal perpajakan pemerintah dibawah naungan kementerian keuangan negara telah banyak melakukan perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, demi menciptakan mekanisme perpajakan terbaik bagi negara dan dapat memaksimalkan pendapatan negara dalam bidang perpajakan. Tercatat sudah beberapa kali terjadi perubahan tarif perpajakan yang pernah dilakukan pemerintah dan yang terbaru adalah tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh pasal 21) yang semula menggunakan tarif progresif berubah menjadi tarif efektif rata-rata (TER) (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFA., CA., 2023).

Kegiatan edukasi dan pelatihan yang diselenggarakan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pengisian dan pelaporan melalui e-SPT. Salah satu bentuk pendampingan yang terbukti efektif adalah bantuan langsung dalam proses pengisian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, terutama bagi mereka yang menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur perpajakan. Banyak Wajib Pajak tidak hanya membutuhkan bantuan teknis dalam mengisi formulir SPT, tetapi juga menunjukkan minat untuk belajar dan berkonsultasi terkait persoalan penghasilan maupun perhitungan pajaknya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan yang lebih luas terhadap akses pengetahuan perpajakan. Kesulitan yang dihadapi biasanya berasal dari keterbatasan latar belakang akuntansi dan perpajakan, termasuk kebingungan dalam menghitung ulang jenis penghasilan yang harus dilaporkan. Tidak sedikit pula yang belum memahami perbedaan antara pajak penghasilan yang bersifat final dan tidak final, sehingga rawan

melakukan kesalahan saat pengisian. Dengan adanya pendampingan dan 3 penyuluhan, hambatan ini dapat diminimalkan, sehingga wajib pajak lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri dan akurat (Okfitasari & Santoso, 2022).

Kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan menjadi keharusan bagi setiap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), karena apabila tidak disampaikan sebelum tenggat waktu yang ditentukan, maka sanksi administrasi dapat dikenakan sesuai ketentuan perpajakan. Meski demikian, tidak semua WPOP memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses pelaporan, terutama mereka yang berprofesi sebagai pelaku UMKM atau pekerja bebas. Banyak di antara mereka masih mengalami kebingungan dalam menggunakan e-Form dan belum terbiasa dengan prosedur pelaporan yang sesuai. Untuk kategori WPOP yang memiliki usaha sendiri atau pekerjaan bebas, pelaporan dilakukan menggunakan Formulir 1770 melalui platform e-Form. Sementara itu, bagi WPOP yang bekerja pada satu pemberi kerja, pelaporan SPT dilakukan menggunakan Formulir 1770SS atau 1770S, yang dapat diakses lebih praktis melalui sistem e-Filing secara daring. Dengan adanya variasi formulir dan platform ini, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami jenis kewajiban yang relevan dengan situasinya masing-masing, agar proses pelaporan berjalan lancar dan risiko sanksi dapat dihindari (Wicaksono et al., 2023).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Prosedur Pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Konsultan Pajak Asmadi & Rekan ?
2. Apa Prosedur Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Konsultan Pajak Asmadi & Rekan ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Untuk mengetahui Prosedur Pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Konsultan Pajak Asmadi & Rekan
2. Untuk mengetahui Prosedur Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Konsultan Pajak Asmadi & Rekan

Melalui laporan tugas akhir ini besar harapan penulis untuk karya ilmiah yang di buat dapat menjadi suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat baik bagi penulis, bagi masyarakat luas dan bagi siapapun yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis tersebut. Dan dengan adanya karya ilmiah ini dapat membantu banyak orang yang memerlukan edukasi tentang pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini antara lain:

A. Bagi penulis

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Studi Diploma III Perpajakan di Universitas Jambi.
2. Laporan akhir ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman penulis mengenai prosedur pelaporan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dalam praktik kerja dan persiapan tugas akhir ini.

B. Bagi instansi

Sebagai bahan masukan dalam upaya mempertahankan dan juga meningkatkan kinerja terhadap pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang ada pada kantor konsultan pajak Asmadi & rekan.

C. Bagi pembaca

Sebagai bahan referensi pembelajaran tambahan dan sebagai bahan perbandingan dalam penulisan materi yang sejenis tentang pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang ada pada kantor konsultan pajak Asmadi & rekan.

1.4 Metode Penulisan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

- a. Data primer: data ini mengacu pada informasi yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. Data ini dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait.

- b. Data sekunder: data ini mengacu pada informasi yang diperoleh dari data wajib pajak individu yang telah disediakan oleh kantor konsultan pajak Asmadi & rekan, seperti informasi pribadi wajib pajak, laporan aset, dan omset bruto.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Metode Observasi (pengamatan)

Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dan kegiatan pajak yang dilakukan di kantor konsultan pajak Asmadi & Rekan.

- b. Interview (wawancara)

Dalam metode ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Asmadi, serta karyawan dan pihak-pihak relevan lainnya yang terlibat dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di kantor konsultan Asmadi & Rekan.

- c. Arsip

Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data dari dokumen, buku, dan bahan arsip lainnya yang tersedia di kantor konsultan pajak Asmadi & Rekan.

1.6 Waktu dan Lokasi Magang

Kegiatan magang dijadwalkan berlangsung dari 12 Februari 2025, hingga 30 April 2025, di kantor konsultan pajak Asmadi & rekan.

1.7 Sistematika penulisan

Tujuan dari penulisan garis besar sistematis ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi laporan akhir, memungkinkan pembaca untuk dengan mudah memahami hubungan antara bab. Laporan akhir ini terdiri dari empat (4) bab, masing-masing memuat beberapa subbab yang mencakup informasi berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang pemilihan judul, isu-isu utama, tujuan dan manfaat penulisan, metode yang digunakan dalam proses penulisan, waktu dan lokasi magang, serta struktur sistematis dari penulisan.

b. BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis membahas dasar-dasar teoretis dan konsep konsep yang menjadi dasar untuk tugas akhir ini, yang diidentifikasi selama kegiatan magang. Konsep-konsep ini digunakan untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas di bab selanjutnya.

c. BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang sejarah kantor konsultan pajak Asmadi & rekan serta prosedur pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang ada pada kantor konsultan pajak Asmadi & rekan.

d. BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup dari laporan tugas akhir yang telah penulis buat berisikan kesimpulan dan saran yang nantinya diharapkan dapat berguna untuk diri penulis sendiri, untuk tempat penulis melakukan kegiatan magang kerja dan tentunya untuk masyarakat luas yang membacanya.